

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Empiris Pada OPD Kab Temanggung)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-I**



Disusun oleh:  
**Ari Suparwati**  
NPM.15.0102.0226

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2019**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS**

**LAPORAN KEUANGAN**

**(Studi Empiris Pada OPD Kab Temanggung)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun oleh :  
**Ari Suparwati**  
NIM. 15.0102.0226

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2019**

# SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Empiris Pada OPD Kab Temanggung)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Ari Suparwati

NPM15.0102.0226

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 20 Agustus 2019

Susunan Tim Penguji

Pembimbing



Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc. Ak.

Pembimbing I

\_\_\_\_\_

Pembimbing II

Tim Penguji



Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc. Ak.

Ketua



Wawan Sadtyo N., S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekretaris



Farida, S.E., M.Si., Ak., CA.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal 26 SEP 2019

\_\_\_\_\_

Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Suparwati

NIM : 15.0102.0226

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Empiris Pada OPD Kab Temanggung)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjananya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bila diperlukan.

Magelang, 20 Agustus 2019

Pembuat Pernyataan,



*Ari*  
Ari Suparwati

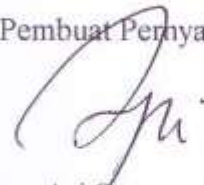
NIM. 15.0102.0226

## RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Ari Suparwati  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Magelang, 04 Mei 1975  
**Agama** : Islam  
**Status** : Menikah  
**Alamat Rumah** : dsn Kentangan, Ds Banjarnegoro, Kec. Mertoyudan, Kab.Magelang.  
**Alamat Email** : ari-suparwati4575@gmail.com  
**Pendidikan Formal:**  
**Sekolah Dasar (1982 - 1988)** : SD Negeri Secang 3  
**SMP (1988 - 1991)** : SMP Pendowo Secang  
**SMA (1991 - 1994)** : SMA Negeri 1 Grabag  
**Perguruan Tinggi (2015-2019)** : Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 20 Agustus 2019

Pembuat Pernyataan,



Ari Suparwati

NIM. 15.0102.0226

## **MOTTO**

Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir.

(QS. Yusuf: Ayat 87)

Kejujuran adalah kebijaksanaan yang paling baik

Untuk menjadi orang sukses tidak harus menjadi orang pintar dan kaya, tetapi bagaimana mengubah pola pikir dan dapat mengikuti perubahan. Apabila jatuh maka harus bangkit dan melangkah lagi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada OPD Kab Temanggung)”**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak lepas dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini
2. Bapak Wawan Sadtyo Nugroho, SE, M.Si selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
3. Ibu Farida, SE, M.Si selaku dosen penguji 2 (dua) yang sudah banyak membantu memberikan kritik serta saran terhadap perbaikan skripsi saya.
4. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Kedua orang tua, suami, anak-anak dan keluarga yang telah memberikan motivasi dan bantuannya sehingga terselesaikannya laporan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan partisipasi dalam laporan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Persetujuan .....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian .....	iii
Halaman Riwayat Hidup .....	iv
Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
Abstrak .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS</b>	
A. Telaah Teori .....	9
1. Teori <i>Stewardship</i> .....	9
2. Kualitas Laporan Keuangan.....	10
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	13
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	14
5. Sistem Pengendalian Intern .....	16
6. Pengawasan Keuangan .....	17
B. Telaah Penelitian Sebelumnya .....	20
C. Perumusan Hipotesis .....	22
D. Model Penelitian .....	28
<b>BAB III METODA PENELITIAN</b>	
A. Populasi dan Sampel .....	29
B. Variabel dan Pengukuran Variabel .....	31
C. Teknik Analisis Data .....	33
1. Statistik Deskriptif .....	33
2. Uji Kualitas Data .....	33
a. Uji Validitas .....	34
b. Uji Reliabilitas .....	34
3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	35
4. Pengujian Hipotesis .....	35
a. Koefisien Determinasi .....	35
b. Uji F .....	36
c. Uji t .....	36



<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Statistik Deskriptif Data .....	38
B. Uji Kualitas Data .....	42
1. Uji Validitas .....	42
2. Uji Reliabilitas .....	44
C. Hasil Pengujian Hipotesis.....	45
1. Analisis Regresi Linier Berganda .....	45
2. Koefisien Determinasi .....	46
3. Uji F .....	47
4. Uji t .....	48
D. Pembahasan Pengaruh .....	51
 <b>BAB V KESIMPULAN</b>	 56
A. Kesimpulan .....	57
B. Keterbatasan .....	57
C. Saran .....	59
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	 59
<b>LAMPIRAN</b> .....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Telaah Penelitian Sebelumnya .....	20
Tabel 3.1	Definisi dan Pengukuran.....	31
Tabel 4.1	Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	38
Tabel 4.2	Profil Responden .....	39
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif .....	40
Tabel 4.4	Pengujian Validitas .....	43
Tabel 4.5	<i>Cross Loading</i> .....	43
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas .....	44
Tabel 4.7	Uji Regresi Linier Berganda .....	45
Tabel 4.8	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	46
Tabel 4.9	Uji F .....	47
Tabel 4.10	Uji t .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian .....	28
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F .....	36
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t .....	37
Gambar 4.1 Penerimaan Uji F .....	48
Gambar 4.2 Uji t Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	50
Gambar 4.3 Uji t Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .....	51
Gambar 4.4 Uji t Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	51
Gambar 4.5 Uji t Variabel Pengawasan Keuangan .....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	62
Lampiran 2. Daftar OPD di Kabupaten Temanggung .....	69
Lampiran 3. Daftar Sampel dan Pengambilan Kuesioner .....	70
Lampiran 4 Tabulasi Data Pengisian Kuisisioner.....	71
Lampiran 5 Tabulasi Data Pengisian Kuisisioner Setelah diolah.....	85
Lampiran 6 Statistik Deskriptif .....	98
Lampiran 7. Uji Validitas.....	99
Lampiran 8. Uji Realibilitas.....	109
Lampiran 9. Analisis Regresi Linier Berganda .....	110
Lampiran 10 Surat Ijin Riset .....	111
Lampiran 11 Bukti Penyebaran Kuesioner .....	113

## ABSTRAK

### **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada OPD Kab Temanggung)**

**Oleh:  
Ari Suparwati**

Kualitas Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan yang disajikan dalam periode tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah, terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Temanggung. Data dalam penelitian ini berdasarkan pada kuesioner. Sampel penelitian diambil menggunakan metode *purposive sampling* yang terdiri dari 103 pegawai di OPD Kabupaten Temanggung. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk variabel Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung

***Kata kunci : Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan, kualitas laporan keuangan***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah merupakan salah satu organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Pada hakekatnya laporan keuangan daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi maupun transaksi lainnya. Terkait dengan tujuan tersebut pemerintah daerah dituntut memiliki tanggung jawab terhadap kualitas laporan keuangan sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang handal.

Informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karenanya informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi yang bermanfaat adalah informasi yang berkualitas, dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Terkait tentang informasi yang bermanfaat tersebut, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Adapun definisi kualitas laporan keuangan menurut Sukmaningrum, (2012) adalah sejauh mana informasi tersebut sesuai dan bermanfaat untuk kebutuhan para pengguna. Keberhasilan pemerintah di nilai dari LKPD yang berkualitas, LKPD dianggap baik jika mendapat opini wajar tanpa pengecualian, sejak diberlakukannya otonomi daerah setiap pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi diwajibkan menerbitkan LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) berupa laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), laporan keuangan yang terdiri dari neraca, LO (laporan operasional), LPE (laporan perubahan ekuitas), dan LAK (laporan arus kas), dan CALK (catatan atas laporan keuangan). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan.

Ada empat Opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan antara lain adalah : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Opini (TMP). Ketika Badan Pengawas Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan, artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, opini WTP diberikan berdasar pada akuntabilitas pengelolaan dan laporan keuangan daerah. Namun demikian pengelolaan keuangan daerah sampai saat ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan arahan dan bimbingan dari BPK. Begitu juga dengan fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kabupaten Temanggung berhasil mempertahankan opini WTP dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 (Semarang.bpk.go.id.) Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari evaluasi kinerja keuangan dari Opini BPK selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2013 – 2017.

**Tabel 1.1**  
**Opini BPK terhadap Kualitas Laporan Keuangann se karisidenan Kedu**

No.	Entitas	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017
1.	Kab.Kebumen	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
2.	Kab. Magelang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
3.	Kab. Purworejo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab. Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Wonosobo	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
6.	Kota Magelang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Bersumber dari hasil audit BPK yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Temanggung selama 2013 – 2017 selalu



mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya OPD Kabupaten Temanggung baik dalam kualitas laporan keuangannya.

Namun hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017, masih ada beberapa hasil audit BPK yang menyatakan bahwa terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain terdapat penatausahaan persediaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas yang belum memadai sehingga terdapat vaksin yang belum tercatat di Neraca Pemerintah Kabupaten Temanggung. BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan hasil BPK, (2017)

Penelitian terdahulu terkait dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi menghasilkan laporan yang berkualitas. Penelitian ini dilakukan oleh Yuliani & Agustini, (2016) tentang Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti & Erawati, (2016) tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (pada pemerintah daerah Kabupaten Badung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman berbasis akrua

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah, dkk, (2017) tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Depok). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian tersebut juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Baturante, dkk, (2018) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian informasi pemerintah, sistem akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, *review* atas laporan keuangan dan budaya birokrasi berpengaruh positif terhadap keandalan informasi laporan keuangan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari, dkk (2018).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sundari, dkk, (2018) dengan persamaan menggunakan semua variabel yang ada sedangkan perbedaannya adalah **pertama** dengan menambahkan variabel pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh

pihak ekstern dan intern karena dengan pengawasan keuangan daerah yang baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan baik sehingga penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas dari KKN sesuai penelitian dari Dewi & Rini, (2018). Semakin tinggi pengawasan keuangan pemerintah daerah maka semakin tinggi nilai informasi pelaporan keuangan Tanjung, Hariani, & Indrastuty, (2016). Alasan ditambahkan variabel tersebut di OPD Kabupaten Temanggung karena pemerintah dituntut untuk dapat memberikan laporan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel.

**Kedua**, objek penelitiannya yaitu di OPD Kabupaten Temanggung karena meskipun mendapat opini WTP dari BPK terhadap kualitas laporan keuangannya selama 5 tahun berturut-turut tetapi berdasar pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa dalam sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan belum dilaksanakan secara optimal.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menguji pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

### **D. Kontribusi Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan pada literatur akuntansi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih mengkhususkan pada kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi aparat pemerintah daerah mengenai faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga tercipta kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian awal penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan
- BAB II Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis. Bagian ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian, telaah penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis dan model penelitian.
- BAB III Metoda Penelitian. Bagian ini berisi tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel serta metode analisis data, dan pengujian hipotesis.
- BAB IV Hasil dan Pembahasan. Bagian ini berisi tentang analisis data yang diperoleh dari penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB V Kesimpulan. Bagian ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Teori

##### 1. *Stewardship theory*

*Stewardship theory* muncul bebarengan dengan perkembangan akuntansi. Teori *stewardship* berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, dimana *steward* termotivasi untuk berkelakuan sesuai keinginan *principal*. Teori *stewardship* adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1989).

*Stewardship theory* menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *steward*, maka *steward* akan berusaha bertindak sesuai dengan tindakan *principal* dan demi kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam *stewardship theory* adalah manajer menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan *Principal* namun tidak berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan.

Darini (2005) menjelaskan bahwa Amanah, memiliki integritas, bertindak jujur dan bertanggung jawab adalah sifat manusia yang dijadikan dasar dalam membangun teori *stewardship*. Hal itu berarti dalam pandangan *stewardship theory*, manajemen dipercaya untuk bekerja

dengan baik bagi kepentingan publik dan *shareholder*. Teori ini menjelaskan bentuk pola kepemimpinan dan hubungan para atasan dengan bawahannya dalam sebuah organisasi menggunakan mekanisme situasional. Mekanisme ini meliputi filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, serta kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan masing-masing Anton, (2010).

Teori ini digunakan karena teori ini memandang bahwa kepercayaan atas manajemen dapat terjadi jika manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul, yaitu kepentingan publik pada umumnya dan kepentingan *shareholders* pada khususnya. Teori ini menjelaskan bahwa kinerja perusahaan dapat meningkat karena adanya sifat amanah dan setia manajer perusahaan terhadap komitmen dalam perusahaan Kurniawan, (2013).

## **2. Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah taraf atau derajat suatu laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan serta transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode Andrianto (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Untuk mengukur Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah menurut PP No. 71 Tahun 2010, sebagai berikut :

1) Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a) Manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.



2) Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :

a) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan. Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara intern dan eksternal. Perbandingan secara intern dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

- 4) Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sukmaningrum, (2012) mendefinisikan kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana informasi tersebut sesuai dan bermanfaat untuk kebutuhan para pengguna. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

### **3. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan dasar dan kualitas kerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik Fikri dkk., (2015: 3). Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan

pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan, Mardiasmo, (2002:146). Kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan dan kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas demi keberhasilan organisasinya.

Kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi khususnya pada kualitas informasi laporan keuangan. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan Indriasari, dkk. (2008).

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

#### **4. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Rogers (1986) “Teknologi informasi merupakan perangkat keras bersifat organisatoris dan meneruskan nilai-nilai sosial dengan siapa individu atau khalayak mengumpulkan, memproses, dan

saling mempertukarkan informasi dengan individu atau khalayak lain.” Pendapat tersebut mengisyaratkan bagaimana teknologi informasi dapat memberikan andil dalam proses komunikasi individu secara efektif, khususnya dalam menembus ruang dan waktu ketika berkomunikasi dengan individu lainnya. Kecenderungannya dalam upaya memperoleh efektivitas komunikasi jarak jauh, seperti *instrumental tools*, atau dalam konteks teknologi informasi, maka teknologi yang digunakan diantaranya komputer dan piranti pendukung lainnya. Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah, akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Thompson, Higgins, Howell (1991), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran data yang didapat dari mengkombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi. Untuk mengukur teknologi informasi dapat dilihat dari tingkat integritas teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang ditandai dengan hal-hal berikut :

- 1) Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja.
- 3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.

- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
- 8) Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.

## **5. Sistem Pengendalian Intern**

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008, pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mulyadi, (2013) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Mulyadi, (2013) unsur pokok sistem pengendalian intern adalah:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- 3) Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Berdasarkan pelaporan keuangan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 pasal 3, unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

## **6. Pengawasan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar

semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik Mardiasmo, (2001). Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No.74 tahun 2001, (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah ditetapkan. Menurut Nordiawan, (2008) jenis pengawasan laporan keuangan negara meliputi dua hal, yaitu:

- a. Pengawasan internal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah.

- b. Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang keseluruhannya berasal dari luar lingkungan organisasi pemerintah yang tupoksinya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi Halim, dkk, (2012). Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku Baswir, (1999).

Pada pengawasan keuangan daerah berkaitan erat dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pencapaian keberhasilan suatu visi dan misi membutuhkan pengawasan yang baik dan maksimal baik dalam segi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Semakin baik tingkat pengawasan pengelolaan keuangan daerah maka akan menghasilkan kinerja pemerintah yang baik pula.



## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Kiranayanti & Erawati, (2016)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ( Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten Badung)	Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
2	Yuliani & Agustin (2016)	Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan SAKD dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Pengendalian Intern Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
3	Tanjung Hariani & Indrastuty ( 2016)	Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian intern & Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan pemerintah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan

**Tabel 2**  
**Penelitian Terdahulu**  
**Lanjutan**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
4	Alamsyah,dkk (2017)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
5	Baturante, dkk (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian informasi pemerintah, sistem akuntansi pemerintah, pemanfaatan tehnologi informasi, <i>review</i> atas laporan keuangan dan budaya birokrasi berpengaruh positif terhadap keandalan informasi laporan keuangan
6	Dewi &Rini (2018)	Pengaruh Pengawasan keuangan, Sumber daya manusia, Teknologi Informasi,dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan	Pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia, teknologi informasi berpengaruh positif tidak signifikan, pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

**Tabel 2**  
**Penelitian Terdahulu**  
**Lanjutan**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
7	Sundari,dkk (2018)	Pengaruh Kompetensi sdm Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018)	Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

*Sumber : Penelitian terdahulu 2018*

### C. Perumusan Hipotesis

#### 1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mangkunegara, (2012) Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Kompetensi sumber daya manusia diperlukan oleh organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Semakin bagus sumber daya yang dimiliki maka kemungkinan keberlanjutan kegiatan akan terjamin. Sebagai suatu contoh, kegiatan yang sangat dibutuhkan keakuratan datanya dalam kegiatan perusahaan maupun organisasi adalah penyajian laporan keuangan.

Teori *stewardship* menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya

dengan tepat. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *stewards* (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang didukung dengan latar belakang pendidikan memadai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Apabila kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki bagus, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang baik. Tetapi apabila sumber daya manusia yang dimiliki tidak berkompeten maka kualitas laporan keuangan dapat diragukan.

Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti & Erawati, (2016), Tanjung Hariani & Indrastuty, (2016) , Alamsyah, dkk. (2017), Baturante dkk.,( 2018) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

***H<sub>1</sub> Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Pada Kualitas Laporan Keuangan***

## **2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Perkembangan teknologi informasi direspon

oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau website. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan penggunaan TI dari karyawan suatu organisasi Siahaya,dkk (2015).

Organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya menerapkan teori *stewardship* dalam pemanfaatan teknologi informasi. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *principals* dan manajemen. Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat membantu penyampaian Informasi dengan cepat sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, pekerjaan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan pelaporan hasil kerja sehingga tercapai kualitas laporan keuangan yang baik. Pemanfaatan teknologi yang tidak maksimal mempengaruhi kualitas laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan. Apabila dalam penyampaian informasi laporan keuangan kurang maksimal maka akan terjadi konflik antara pihak yang berkepentingan (*principals* dan *agent*). Hal tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Agustini, (2016), Alamsyah, dkk., (2017), Baturante (2018), Sundari, dkk (2018) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

## ***H2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.***

### **3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Aren, (2008) sistem pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi dari operasional dan pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah perlu diciptakannya sistem pengendalian intern pemerintah agar instansi pemerintah dapat mengetahui dana publik yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Rosdiana, (2010).

Teori *stewardship* menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *stewards* (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

Sistem Pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi organisasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu organisasi akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga akan memberikan suatu keyakinan bagi organisasi bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, dan hal tersebut akan memberikan dampak positif kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern akan memberikan pedoman pelaksanaan dan pengawasannya yang berperan penting terhadap kualitas laporan keuangan. Strategi dan pelaksanaan sistem pengendalian intern ini harus tetap dipantau agar kegiatan perencanaan dan hasil pelaksanaan dapat seimbang. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti & Erawati, (2016), Alamsyah,dkk. (2017), Dewi & Rini, (2018), Sundari dkk., (2019), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

***H<sub>3</sub>. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan***

#### **4. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Primayana, K.H., dkk., (2014) semakin baik pengawasan keuangan daerah maka akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam pelaporan keuangan yang menjadi lebih andal. Pengawasan keuangan daerah yang baik akan berguna untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, juga untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya pada pemerintah daerah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan pemerintah yang baik dalam hal ini tercermin dalam pelaporan keuangan yang andal.

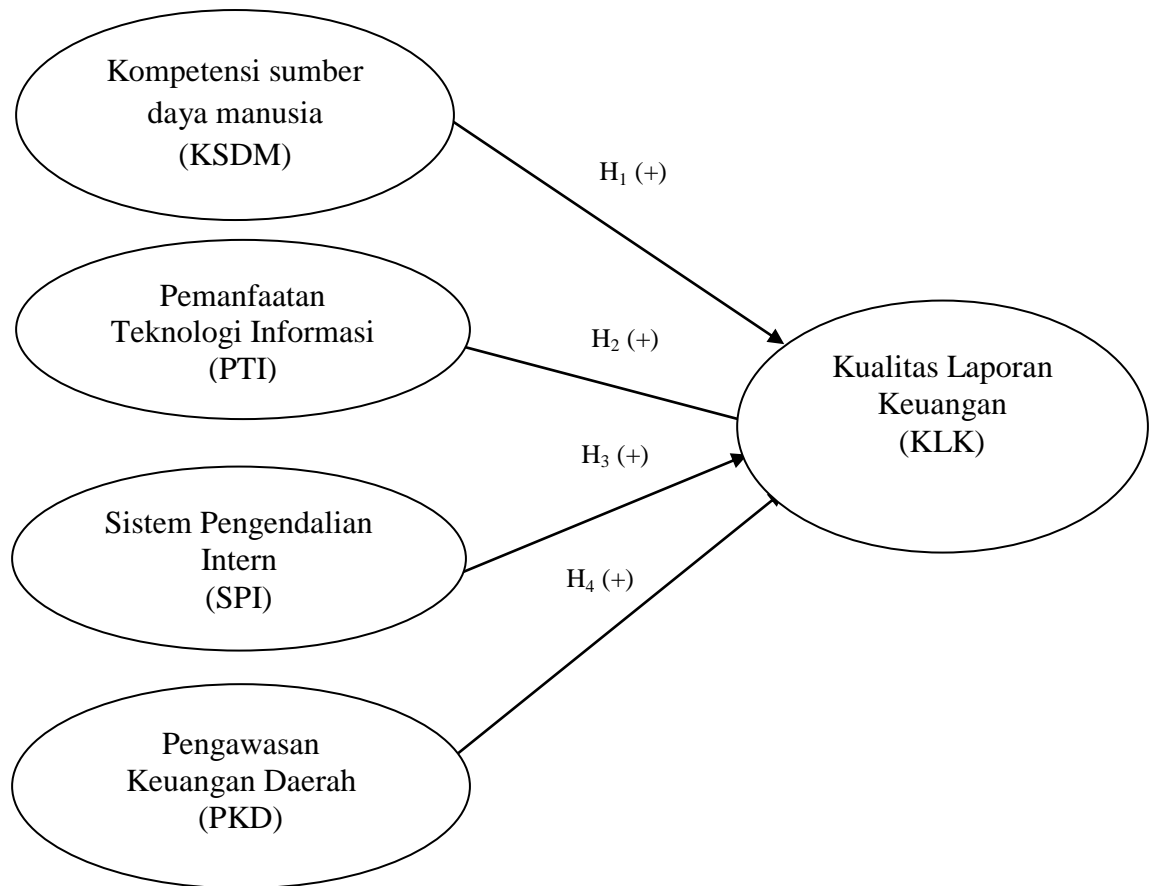
Pengawasan keuangan daerah dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kepentingan masyarakat (*principal*). Pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan).

Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Rini, (2018), Tanjung dkk., (2016) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:



***H<sub>4</sub>. Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.***

**D. Model Penelitian**



Gambar 1.1  
Model penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Populasi dan Sampel Penelitian**

###### **a. Populasi**

Populasi objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian Riduwan, (2010). Populasi dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bagian akuntansi/keuangan, bendahara, dan staf yang terlibat langsung di SKPD yang meliputi dinas, badan dan kantor di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

###### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2007). Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini.

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas, Kepala bagian akuntansi/keuangan, bendahara dan staf yang terlibat langsung dalam penyusunan pelaporan keuangan pada OPD Kabupaten Temanggung, disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masing-masing dinas/instansi.

2. Memiliki masa kerja kurang dari satu tahun atau lebih, dalam periode penyusunan laporan keuangan.

## **2. Teknik Pengambilan Data**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden yang terlibat secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan di OPD Kabupaten Temanggung.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data Primer, yang diperoleh dengan penyebaran kuisisioner. Kuisisioner merupakan salah satu alat pengumpul data dalam asesmen nontes, yang berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden Sukardi, (1983).

Kuisisioner akan dibagikan kepada responden yang ada di OPD di Kabupaten Temanggung dan diberikan jeda penyerahan jawaban 2 - 3 hari kerja. Hasil pengisian kuisisioner tersebut akan diambil langsung oleh peneliti.

## **B. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**

**Tabel 3.1**

### Definisi dan Pengukuran

Variabel	Definisi Operasional	Instrumen Penelitian
Kualitas Laporan Keuangan	Menggunakan 4 (empat) karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yaitu: Relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami	<p>Pengukuran variabel menggunakan 7 pernyataan bersumber dari Simanungkalit &amp; MH, (2016) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan</li> <li>b. Ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan</li> <li>c. Kelengkapan informasi yang disajikan</li> <li>d. Penyajian secara jujur</li> <li>e. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi</li> <li>f. Keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan</li> <li>g. Isi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.</li> </ol> <p>Pengukuran variabel ini menggunakan skala <i>Likert</i>.</p>
Kompetensi Sumberdaya manusia	Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sukmaningrum (2012).	<p>Pengukuran variabel ini menggunakan 10 pertanyaan bersumber dari Harahap (2015), terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jumlah SDM yang memadai</li> <li>b. latar belakang pendidikan akuntansi</li> <li>c. uraian pekerjaan</li> <li>d. peran dan tanggung jawab</li> <li>e. kesesuaian</li> <li>f. uraian tugas dengan fungsi akuntansi</li> <li>g. pedoman kerja bidang akuntansi</li> <li>h. pelaksanaan proses akuntansi</li> <li>i. sumber daya pendukung operasional pelatihan</li> <li>j. penggunaan anggaran untuk mendukung kapasitas SDM</li> </ol>

**Tabel 3.2**  
**Definisi dan Pengukuran**  
**(lanjutan)**

Variabel	Definisi Operasional	Instrumen Penelitian
Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer ( <i>mainframe, mini, micro</i> ), perangkat lunak ( <i>software</i> ), database, jaringan (internet, intranet), <i>electronic commerce</i> , dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi Wilkinson dkk , (2000)	Pengukuran variabel ini menggunakan 9 pertanyaan dari Agustina & Lia, (2016), yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketersediaan <i>hardware</i></li> <li>b. proses akuntansi secara komputerisasi</li> <li>c. jadwal pemeliharaan</li> <li>d. ketepatan waktu jadwal pemeliharaan</li> <li>e. ketersediaan perangkat lunak (<i>software</i>)</li> <li>f. <i>Software</i> sesuai dengan peraturan perundangan</li> <li>g. tersedianya sistem keamanan komputer</li> <li>h. pemanfaatan jaringan dan internet</li> <li>i. pengolahan data yang terintegrasi</li> </ol> Pengukuran variabel menggunakan 5 pernyataan dari Artana, (2016) yaitu :
Sistem Pengendalian Intern	Pengendalian Intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku Nurilah & Muid, (2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan Pengendalian</li> <li>2. Penilaian risiko</li> <li>3. Kegiatan Pengendalian</li> <li>4. Informasi dan komunikasi</li> <li>5. Pemantauan pengendalian internal</li> </ol> Pengukuran variabel ini menggunakan skala <i>Likert</i> .
Pengawasan Keuangan Daerah	Pengawasan keuangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan yang telah ditentukan. Pengawasan keuangan daerah perlu untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efektif, efisien, dan ekonomis atau belum. Gerryan Putra, (2017)	Pernyataan mengacu pada penelitian Suparno, (2012) dengan 10 indikator yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengelolaan SDM,</li> <li>2. Metode Pembukuan,</li> <li>3. pengawasan Ekstren dan Intern,</li> <li>4. Pengawasan langsung dari atasan,</li> <li>5. Pengawasan dan Pengendalian untuk kesejahteraan seluruh masyarakat,</li> <li>6. Dasar pembuatan Anggaran,</li> <li>7. Pelaksanaan Kegiatan Audit.</li> <li>8. Pengawasan, terhadap pelaksanaan APBD oleh DPRD</li> <li>9. Pembinaan dan PPKD,</li> <li>10. .Penegakan hukum</li> </ol>

## C. Teknik Analisis Data

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang Pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Penelitian juga menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari mean, deviasi standar, minimum dan maksimum (Ghozali 2018).

### 2. Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:53). Pengukuran validitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan cara *Confirmatory Factor Analysis (CFA)* yaitu untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukur konstruk atau variabel maka akan memiliki nilai *loading factor* yang tinggi (Ghozali, 2018:53) alasan penggunaan *CFA* adalah karena memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan *person correlation* yaitu kemampuannya untuk menghasilkan faktor yang terbebas dari

korelasi yang muncul di antara variabel yang diteliti dengan indikator variabel.

Asumsi yang mendasari digunakannya analisis faktor adalah suatu data matrik harus memiliki korelasi yang cukup. Uji *Barlett of Sphericity* digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel, maka *Barlett Test* akan semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA)*. Nilai MSA ini bervariasi dari 0 sampai 1 dan *cross loading* > 0,5 untuk data dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018:53)

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap pernyataan yang sama menggunakan alat ukur yang sama pula. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach Alpha ( $\alpha$ )*, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel), bila memiliki *cronbach alpha*  $\geq$  0,7 (Sekaran, 2007)

### **3. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih. Dalam penelitian ini sebagai variabel independen

Kompetensi sumber daya manusia (Ksdm), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Pengawasan Keuangan Daerah (PKD) dan variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan (KLK). Bentuk persamaan regresi linear berganda yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

$$KLK = \alpha + \beta_1 KSDM + \beta_2 PTI + \beta_3 SPI + \beta_4 PKD + e$$

Keterangan =

KLK	=	Kualitas Laporan Keuangan.
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	=	Koefisien regresi
KSDM	=	Kompetensi sumber daya manusia
PTI	=	Pemanfaatan Teknologi Informasi
SPI	=	Sistem Pengendalian Intern
PKD	=	Pengawasan Keuangan Daerah
e	=	<i>Error Term</i>

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinan ( $R^2$ ) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen menjelaskan variabel dependen.

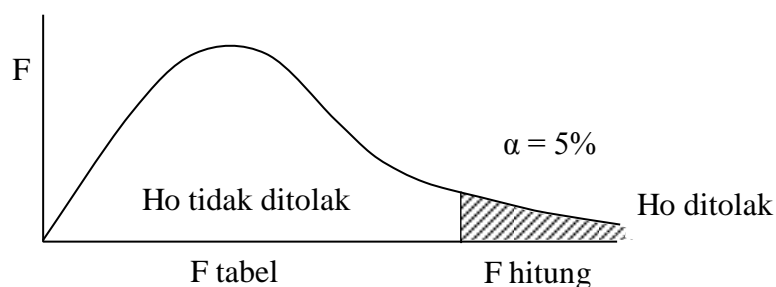
##### b. Pengaruh Uji F (*Goodness of Fit*)

Menurut Suliyanto, (2011:53) nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*) apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai



variabel tergantung atau tidak untuk menyimpulkan apakah model masuk dalam kategori *Goodness of Fit* atau tidak. Pengujian dilakukan dengan kriteria:

- 1) Jika  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ , atau  $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya model yang digunakan bagus atau fit.
- 2) Jika  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ , atau  $p \text{ value} > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya model yang digunakan tidak bagus atau tidak fit

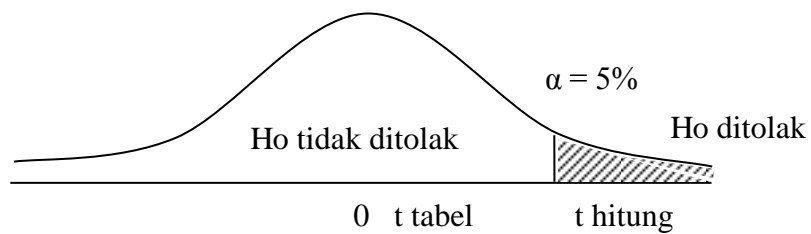


**Gambar 3.1**  
**Penerimaan Uji F**

### c. Uji t

Menurut Suliyanto (2011:53), nilai  $t$  hitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai  $t$  hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel. *Level of significant*s pada taraf  $\alpha = 5\%$  dengan derajat kebebasan dinyatakan dalam  $df = n-1$ . Pengujian dilakukan dengan kriteria:

- 1) Jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , atau  $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ , atau  $p \text{ value} > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya secara statistik data yang ada tidak dapat membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen



**Gambar 3.2**  
**Penerimaan Uji t**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Sampel yang diambil yaitu pada OPD Kabupaten Temanggung, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 103 kuesioner yang dapat diolah. Hasil *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 38,5% sedangkan sisanya 61,5% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti atau diluar model penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya model yang digunakan sudah bagus. Sedangkan hasil uji t menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Temanggung.

## **B. Keterbatasan**

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan penarikan kesimpulan yang kurang sempurna karena sampel yang digunakan hanya di OPD Kabupaten Temanggung sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di seluruh Kabupaten lain.
2. Pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan jawaban dari responden pada kuesioner yang disebarkan, hal tersebut akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian ini hanya didasarkan pada data secara tertulis dari kuesioner.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, dimana variabel yang diteliti hanya kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

## **C. Saran**

1. Keterbatasan sampel yang digunakan maka penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel dengan cara menambahkan Kecamatan maupun OPD pada Kabupaten lain ataupun memperluas populasi OPD se-Karisidenan Kedu agar lebih mudah untuk menggeneralisasikan hasil penelitian dan perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek-aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian sehingga kuesioner yang akan digunakan selanjutnya memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.
3. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan seperti penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah maka perlu adanya sosialisasi dan pelatihan mengenai standar akuntansi pemerintahan sehingga akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia terutama bagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang ada pada pemerintah daerah, Yuliani & Agustin (2016).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, & Lia. (2016). *Pengaruh Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan pengawasan daerah sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Kab Aceh Tamiang*.
- Alamsyah, M. R., Rahayu, S., & Muslih, M. (2017). Kompetensi Sumber daya manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah(SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depo. *Jurnal Ekonomi*, 15(2), 201–210.
- Aren, A. A. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance*. Erlangga., Edisi Kedu.
- Artana. (2016). *Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan*.
- Baswir, R. (1999). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE., 3.
- Baturante, N., Kamase, J., & Nasaruddin, F. (2018). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. 1(2), 117–127.
- bpk. (2017). *hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kab Temanggung*.
- Dewi, N. W. L., & Rini, I. G. A. I. S. (2018). Pengaruh Pengawasan keuangan, Sumber daya manusia, Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *Jurnal Krisna*, 10(1), 57–63.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro., (3).
- Halim, Abdul, & M. I. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPPSTIM YKPN, 3.
- Indriasari, D. dan E. N. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Umpulan Artikel Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XI*, (Pontianak).  
*Keputusan Presiden No.74 tahun 2001*.
- Kiranayanti, I. As. E., & Erawati, N. Ma. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruar terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1290–1318.
- Mangkunegara, A. P. (2012). *Evaluasi Kinerja SDM*, PT. Refika Aditama, Bandung. In hlm.40.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. 146.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta, Edisi Ke-ti (Cetakan Keempat).
- Nordiawan, D. (2008). *akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurilah, A. S., & Muid. (2014). *Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi*

- informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD Kota Depok).*  
*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010.* , (2010).  
*Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008.* , (2008).
- Primayana, K.H., Atmadja, A.T., dan Darmawan, N. A. S. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 2(1).
- Riduwan. (2010). Metode dan Teknik Menyusun Tesis. *Bandung: Alfabeta*.
- Rosdiana. (2010). Pengaruh SPIP dan penerapan terhadap good governance terhadap kinerja pemerintah kota padang. *Skripsi*.
- Sekaran. (2007). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. *Salemba Empat. Jakarta*, (4th).
- Semarang.bpk.go.id. (n.d.). Kabupaten Temanggung berhasil mempertahankan opini WTP dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.
- Siahaya, E., Asnawi, M., & Layuk, paulus k allo. (2015). Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia, sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. *Ekonomi Dan Keuangan*, (110), 1–16.
- Simanungkalit, & MH, A. (2016). *Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Satuan Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh*.
- Sukardi. (1983). Bimbingan Karir di Sekolah-Sekolah. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Sukmaningrum. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah: Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang. *Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: teori dan aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Sundari, H., Rahayu, S., & Ak, M. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018 ) The Influence Of Human Resources Compe*. 6(1), 660–667.
- Suparno. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan. Tesis Mahasiswa Universitas Negeri Medan*.
- Tanjung, A. R., Hariani, D., & Indrastuty, S. (2016). *Pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern, & Pengawasan Keuangan daerah terhadap nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu*. 27(2).
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Bisnis & Ekonomi*, 14(1), 56–64.